

Vol. 18 No.2, September 2020 – Februari 2021

ISSN 1412-9000

PERSPEKTIF

JURNAL STUDI INTERDISIPLINER

**FISIP JOURNAL
OF
INTERDISCIPLINARY
STUDIES**

**KULTUR MILITERISME DI MYANMAR
AMBARWATI**

**TRANSFORMASI POLITIK DI TIMUR TENGAH PASCA MUSIM SEMI ARAB:
DEMOKRATISASI YANG GAGAL?
Saiful SYAM**

**KONSEP NILAI ANAK DAN FERTILITAS DI INDONESIA PADA MASA PANDEMI
CORONA VIRUS DISEASE (COVID) - 19
Siti HAJAR**

**UPAYA PEMERINTAH DALAM REVITALISASI SENDI-SENDI KEHIDUPAN
MASYARAKAT INDONESIA DI MASA COVID – 19
Deradjat Mahadi SASOKO**

**RUBRIK FILSAFAT: KATEGORI DALAM FILSAFAT ISLAM
Subarno WIJATMADJA**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JAYABAYA
JAKARTA**

ISSN 1412 - 9000

PERSPEKTIF

JURNAL STUDI INTERDISIPLINER
Vol. 18 No. 02, September 2020 – Februari 2021

Susunan Redaksi

Penanggung Jawab :

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jayabaya

Mitra Bestari :

H. Saiful Syam, Drs., MA., PhD.

Poppy Setiawati Nurisnaeny, Dra., M.S., Dr.

Hj. R. Ayu Toyyibah Kundewi Yudiarti, Dra., M.Si., Dr., Prof.

Hj. Siti Hajar, Dra., M.S., PhD.

Pemimpin Umum / Pemimpin Redaksi :

Subarno Wijatmadja, Drs., M.Hum

Dewan Redaksi :

Ambarwati, Dra., M.Si., Dr.

Moh. Maiwan, Drs., M.Si., PhD.

Reni Arlyan, S.Sos., M. Hub. Int.

Laila Indriyanti Fitria, S.Sos., M.Si

Nina Widyaswasti Aisha, S.Sos.

Sekretariat :

Supriyati, AMd.

Distribusi dan Sirkulasi :

Kusyoto

Alamat Redaksi :

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jayabaya

Jl. Pulomas Selatan, Kav. 23. Jakarta 13210

Telp. (021) 4700903.

Redaksi Mengundang anda untuk mengirimkan Karya Ilmiah dan Hasil Penelitian yang sesuai dengan visi Jurnal ini. Naskah yang dikirim hendaknya asli, belum pernah dipublikasikan, diketik dengan jenis huruf Times New Roman, ukuran 12, sebanyak 12 – 14 halaman kuarto, spasi tunggal. Naskah dapat ditulis dalam Bahasa Indonesia atau Inggris, meliputi: Judul, Nama Penulis, Abstrak, Pendahuluan, Metodologi, Hasil Penelitian dan Pembahasan, Kesimpulan, dan Daftar Pustaka untuk hasil penelitian dan untuk hasil pemikiran ilmiah/kajian teoritik meliputi : Judul, Nama Penulis, Abstrak, Pendahuluan, Pembahasan, Kesimpulan dan Daftar Pustaka. Penulisan kutipan dapat menggunakan model MLA, APA, tradisional dan lain-lain, yang bila memungkinkan akan diubah menjadi model tradisional end notes. Penulis wajib menyertakan Bio Data singkat dan isi tulisan menjadi tanggung jawab penulis serta tidak mencerminkan opini redaksi.

PERSPEKTIF

JURNAL STUDI INTERDISIPLINER

Vol. 18 No. 02 September 2020 – Februari 2021

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI.....	iii
PENGANTAR REDAKSI.....	v
KULTUR MILITERISME DI MYANMAR AMBARWATI	1
TRANSFORMASI POLITIK DI TIMUR TENGAH PASCA MUSIM SEMI ARAB: DEMOKRATISASI YANG GAGAL?..... Saiful SYAM, PhD	21
KONSEP NILAI ANAK DAN FERTILITAS DI INDONESIA PADA MASA PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE (COVID) - 19..... Siti HAJAR, MS., PhD	38
UPAYA PEMERINTAH DALAM REVITALISASI SENDI-SENDI KEHIDUPAN MASYARAKAT INDONESIA DI MASA COVID - 19 Deradjat Mahadi SASOKO	46
RUBRIK FILSAFAT: KATEGORI DALAM FILSAFAT ISLAM..... Subarno WIJATMADJA	54

Tentang Penulis

KULTUR MILITERISME DI MYANMAR

AMBARWATI

ON the first February 2021, there was a coup in Myanmar after general election was held in 2020. Why this country can not move from military government whereas many countries in the world are struggling for democratic type of government is a question. This paper tries to elaborate the question of coup in Myanmar and explore some theories concerning military involvement in politic. Based on history and facts, it is found that from its independence the society of Myanmar has been being influenced by military organizations, not only legally military organization (Tatmadaw) but also armed civil militia.

Keywords: military in politics, militarism, coup d'etat, civil-militia.

1. Pendahuluan

Awal abad 21, peristiwa internasional yang cukup menarik dan terus diperbincangkan salah satunya adalah gelombang demokratisasi (yang juga disebut sebagai gelombang ketiga) yang melanda negara-negara Timur Tengah/Arab Spring.¹ Negara-negara besar saling berlomba untuk terlibat dalam hiruk pikuk proses demokratisasi di Tunisia, Libya, Mesir, Arab Saudi dan Iraq. Bahkan Suriah juga tak luput tersapu gelombang tersebut dan mengalami konflik berkepanjangan hingga sekarang.

Dengan runtuhnya entitas politik komunis terbesar Uni Soviet pada akhir 1990an, sepertinya demokrasi dianggap sebagai alternatif terkuat untuk dipilih sebagai *way of life* oleh sebagian besar masyarakat internasional. Demokrasi diasosiasikan sebagai falsafah yang menghargai hak-hak individu dan melindungi warganegara dari kesewenang-wenangan penguasa. Cara hidup demokrasi menjunjung tinggi keberadaan hukum dan berada pada spektrum yang berlawanan dengan penggunaan kekerasan di semua aspek kehidupan warganegara.

¹ Penulis menganggap bahwa gelombang ketiga demokratisasi dimulai ketika runtuhnya negara Uni Soviet yang diikuti dengan munculnya negara-negara pecahan Uni Soviet serta perubahan rezim politik negara-negara sekutu Uni Soviet, dimana kebanyakan dari negara-negara tersebut mengklaim sebagai negara demokrasi. Ini berbeda dengan apa yang dikemukakan oleh Samuel Huntington yang menyebut gelombang ketiga demokratisasi telah dimulai tahun 1974 ketika terjadi perubahan rezim politik di Portugal. Jadi Arab Spring dalam tulisan ini dianggap sebagai bagian dari gelombang demokratisasi ketiga.

Pada 1 Februari 2021, masyarakat internasional dikejutkan dengan aksi kudeta militer di Myanmar yang menggulingkan pemerintah yang (dianggap) demokratis pimpinan Aung San Suu Kyi (de facto). Negara-negara Barat mengecam aksi kudeta militer yang didalangi oleh Jenderal Min Aung Hlaing ini. Reaksi internasional sangat keras terhadap aksi militer Myanmar. PBB dan Inggris mengutuk, dan Dewan HAM PBB segera bersidang pada Jumat 12 Februari 2021. Sedang Presiden baru Amerika, Joe Biden mengancam untuk memberikan sanksi. (<https://www.bbc.com/news/world-asia-55882489>, 1 Februari, 2021). Ancaman Presiden Joe Biden bukan omong kosong, karena pada tanggal 10 Februari Joe Biden mengeluarkan kebijakan untuk memutuskan akses keuangan para pemimpin militer Myanmar ke dana US\$ 1 miliar ke Amerika. Joe Biden juga menyerukan negara-negara lain bergabung untuk mendesak junta militer mengembalikan demokrasi di Myanmar. (<https://www.kompas.com/global/read/2021/02/11/085906070/joe-biden-putus-akses-keuangan-jenderal-myanmar-ke-as-sebagai-sanksi>, 11 Februari 2021). Reaksi keras negara-negara lain dan organisasi internasional kemungkinan juga dipicu oleh kegeraman, karena sebelum peristiwa kudeta, Jenderal Min Aung Hlaing telah dicurigai berada dibelakang peristiwa pembantaian etnis Rohingya di Propinsi Rakhine.

Pada pagi hari 1 Februari, pasukan militer menangkap Penasehat Negara Aung San Suu Kyii, Presiden Myanmar U Win Myint dan beberapa kepala menteri. Aung San Suu Kyii dan pejabat pemerintah dituduh telah melakukan kecurangan dalam pemilu yang memenangkan partai pimpinan Suu Kyi Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD). Mereka dikenakan tahanan rumah, dan Wakil Presiden U Myint Swe diangkat sebagai Presiden sementara. (<https://www.merdeka.com/dunia/mengapa-militer-myanmar-sangat-kuat.html>, 9 Februari 2021). Pemimpin komisi pemilu Myanmar (KPU nya Myanmar) juga sempat ditahan, karena menolak klaim pihak militer tentang kecurangan pemilu yang dimenangkan NLD. Secara internal, masyarakat Myanmar menolak aksi tersebut dan segera gelombang demonstrasi melanda Nay Piy Taw (ibukota Myanmar). Aksi demonstrasi berlangsung hingga lebih dari seminggu, diikuti berbagai elemen masyarakat seperti para pegawai negeri, tenaga medis dan tak ketinggalan kaum millennial yang melek internet dan menolak kediktatoran militer. (<https://www.bbc.com/indonesia/dunia-56005922>, 11 Februari 2021).

Selain di Nay Piy Taw, di kota-kota lain juga terjadi unjuk rasa besar-besaran, seperti yang terjadi di Mandalay, kota terbesar kedua setelah Nay Piy Taw. Selain itu di kota-kota pelosok seperti di Chin, sebuah kota kecil di propinsi Irawaddi para demonstran mengarak foto Aung San Suu Kyi di jalan-jalan. Di dekat Pagoda Sule, para demonstran membentangkan spanduk

dengan tulisan : “ *We will never kneel down under the military boots*”. Sementara itu situasi secara keseluruhan semakin memanas ketika seorang pendemo perempuan yang baru berusia 20 tahun tertembak kepalanya, dan akhirnya tewas setelah sempat di rawat di rumah sakit. (<https://www.cnbcindonesia.com/news/20210218070709-4-224171/myanmar-makin-membara-warga-demo-besar-lawan-militer>, 18 Februari 2021)

Selain demonstrasi, bank-bank di kota-kota di Myanmar juga tutup. Sebagaimana dilaporkan VOA News, antrian orang di ATM-ATM sangat panjang. Salah seorang pegawai bank yang diwawancarai VOA mengatakan : “*I don’t want to live under [a] military government. So, I joined CDM and fight for democracy*”. CDM (Civil Disobedience Movement) adalah gerakan kampanye untuk menentang pemerintahan militer. Para pengikutnya bersikeras bahwa mereka tidak akan kembali bekerja sampai pemerintahan junta militer mengembalikan kekuasaan. (<https://www.voanews.com/east-asia-pacific/banks-closed-myanmar-anti-coup-protests-financial-chaos-continue>, 20 Februari 2021)

Penolakan keras rakyat Myanmar terhadap pemerintahan militer bisa dipahami karena rakyat Myanmar telah berjuang untuk menjadi negara demokratis sejak militer mengambil alih kekuasaan tahun 1988. Simbol demokrasi yang diusung oleh Liga Demokrasi Nasional (NLD) yaitu partai yang dipimpin oleh Aung San Suukyi, telah berjuang selama beberapa dekade untuk mewujudkan pemerintahan yang demokratis di Myanmar. Aung San Suukyi sendiri telah mengalami masa-masa pengasingan, menjadi tahanan rumah dan bahkan divonis tidak bisa menjadi pemimpin Myanmar karena status pernikahannya dengan orang asing. Namun NLD tidak pernah surut untuk menghimpun dukungan dan berusaha untuk memenangkan pemilu, hingga tahun 2015, NLD memenangkan pemilu dan berhasil memegang kekuasaan.

Situasi politik domestik di Myanmar menjelang kudeta diwarnai dengan saling tuduh antara pemerintahan Win Myint (NLD) dengan pihak militer, isu yang menjadi perdebatan adalah tentang hasil pemilu tahun 2015 yang menurut pihak militer telah terjadi kecurangan yang tidak bisa diterima. Tuduhan ini direspon oleh jurubicara NLD, Myo Nyunt, yang mengatakan bahwa dalam pemilu NLD berhasil meraih 390 kursi dengan demikian bisa mengklaim kemenangan. Tuduhan kecurangan pemilu oleh NLD juga dilontarkan oleh partai oposisi yang didukung militer, *Union Solidarity and Development Party* (USDP), yang menuntut diadakannya pemilu ulang. Tuduhan partai oposisi ini dijawab oleh NLD, bahwa mereka akan berupaya membentuk pemerintahan kesatuan nasional setelah

pemilu resmi diadakan. Namun pada 26 Januari 2021, jurubicara militer Brigadier General Zaw Min Tun mengancam akan mengambil tindakan jika persoalan sengketa pemilu tidak diselesaikan dan menuntut komisi pemilu nasional untuk menyelidiki kecurangan pemilu 2015. Tanggal 28 Januari 2021, komisi pemilu nasional menolak tuntutan pihak militer, karena mereka beranggapan bahwa jumlah suara akibat kesalahan yang terjadi tetap tidak akan mempengaruhi hasil akhir. Hingga kemudian pada pagi hari, 1 Februari 2021, pihak militer menahan para pimpinan NLD termasuk presiden dan wakil presiden.

(<https://www.reuters.com/article/us-myanmar-politics-timeline-idUSKBN2A112I>, 1 Februari, 2021)

Fenomena pemerintahan junta militer di negara-negara Asia bukan fenomena baru. Negara-negara Asia Selatan dan Asia Tenggara telah terbiasa dengan kehidupan dimana militer ikut turut campur dalam kehidupan politik. Selain Myanmar, kita bisa saksikan di Thailand, Indonesia, Korea Selatan, Pakistan adalah negara-negara dimana kelompok sipil saling berebut kekuasaan dengan kelompok militer. Thailand sebagai negara tetangga terdekat Myanmar, dalam sejarahnya juga telah sering mengalami kudeta militer. Pemerintahan sipil yang lemah atau karena kebijakan-kebijakannya kurang populis, sangat menggoda pihak militer untuk campur tangan mengambil alih kekuasaan sipil. Sejak tahun 1932 hingga terakhir kudeta militer tahun 2014, setidaknya telah terjadi 12 kali kudeta militer yang berhasil, dan 7 kali percobaan kudeta yang gagal. Sepertinya negara ini ketagihan akan kudeta militer. (<https://www.vox.com/2015/5/14/18093760/thailand-coup-problem>, 14 Mei 2015).

Tulisan ini berusaha menelaah fenomena campur tangan militer dalam politik di Myanmar, apakah campur tangan militer dalam politik domestik Myanmar merupakan kultur laten ?. Untuk memperoleh gambaran yang lebih, beberapa teori tentang keterlibatan militer dalam politik akan didiskusikan sebagai landasan berpikir untuk memahami fenomena di Myanmar.

2. Berteori Tentang Keterlibatan Militer Dalam Politik

Fenomena keterlibatan militer dalam politik bukan hanya terjadi di negara-negara berkembang, karena dalam format yang berbeda, di negara-negara maju, militer juga melakukan intervensi dalam proses pembuatan kebijakan. Namun pada akhir abad 20 dan awal abad 21, rezim-rezim militer sudah mulai berkurang seiring dengan gelombang ketiga demokratisasi pasca runtuhnya Uni Soviet, sehingga bila ada peristiwa kudeta militer di

satau negara maka hal itu dianggap sebagai peristiwa yang mengejutkan (dan mungkin juga aneh). Dalam sub bab ini akan diuraikan mengenai teori-teori yang menjelaskan tentang keterlibatan militer dalam politik, dan secara khusus menganalisis keterlibatan militer dalam politik di Myanmar dengan menggunakan salah satu teori di bawah ini.

2.1. Keunggulan Organisasi Militer

Kultur militer adalah serangkaian gagasan, prasangka dan persepsi yang menentukan respon militer terhadap tugas-tugas yang ditetapkan oleh otoritas politik. Kultur ini juga menentukan bagaimana organisasi secara internal beroperasi seperti kriteria promosi, training, pendidikan, prioritas dalam hal alokasi sumber-sumber dan penggunaan teknologi, bahkan termasuk pilihan vocabulary dalam hal berdebat. (Applegate dan Moore, 1990 : 320).

Organisasi militer secara umum berbeda dengan organisasi sipil, dan karena itu hal-hal yang berhubungan dengan militerisme dianggap berlawanan dengan ide-ide demokrasi. Samuel Finer mengidentifikasi ada 5 hal yang membuat organisasi militer berbeda dengan organisasi sipil, yaitu : sentralisasi komando, hirarki, disiplin, interkomunikasi, *esprit de corps*. (Finer, 1974 : 7). *Pertama*, sentralisasi komando ; semua perintah dan kebijakan didelegasikan ke unit-unit dalam suatu komando pimpinan tertinggi. Sentralisasi dan sistem hirarkis yang ketat merupakan tuntutan dari tujuan dasar organisasi militer yaitu untuk bertarung sebagai suatu unit, dan untuk itu maka harus memiliki satu jalur komando. *Kedua*, sistem hirarki ; yaitu perintah diberikan dari level tertinggi ke level dibawahnya, sub-ordinat merupakan subyek yang harus patuh. Komando perintah ini dianggap sebagai hal yang sakral. *Ketiga*, disiplin ; sikap disiplin dituntut maksimal dari personel militer . Mereka tidak mudah begitu saja mengabaikan perintah, atau meninggalkan tugas/desersi. Desertir akan menghadapi hukuman berat bahkan bisa hukuman mati. *Keempat*, interkomunikasi ; sentralisasi komando dan susunan otoritas yang hirarkis memerlukan sistem komunikasi yang handal. Organisasi militer menggunakan bentuk-bentuk dan cara komunikasi paling modern dan juga cara-cara dan sarana-sarana yang paling primitif. Semuanya dikembangkan sesuai dengan kondisi medan geografis negara dan medan pertempuran yang harus dihadapi. *Kelima*, *esprit de corps* ; pasukan militer harus memiliki kesadaran dan semangat persatuan serta solidaritas. Semangat dan solidaritas kelompok ini bisa disebut sebagai *mechanical solidarity*, yaitu rasa kebersamaan yang muncul dari rasa saling percaya dan sentiment bersama untuk semua anggota kelompok. Rasa kebersamaan

sebagai sebuah kelompok ini ditanamkan sebagai semangat utama dalam organisasi militer. (Finer, 2002 : 7-9).

Dengan keunggulan-keunggulan demikian, maka militer secara organisasional bisa memainkan peran lebih banyak terutama di negara-negara dimana masyarakatnya masih primitif. Logikanya, di masyarakat yang masih terbelakang, organisasi militer yang lebih solid dibanding organisasi-organisasi sipil, seperti partai politik, parlemen, birokrasi pemerintah. Organisasi-organisasi sipil di masyarakat terbelakang bermasalah dengan hal-hal seperti korupsi, kurang profesional dan nepotisme/klientelisme). (Clark, 1986 : 150). Dengan demikian militer lebih bisa mengatur disiplin masyarakat, menerapkan hukum, menyelenggarakan pendidikan, bahkan bisa mengatur sistem perekonomian. Militer juga bisa menggunakan teknologi militer untuk dikembangkan menjadi teknologi pertanian dan perindustrian umum.

Banyak negara-negara Dunia Ketiga yang baru merdeka setelah Perang Dunia II di Asia, Afrika dan Amerika Latin pada mengalami usaha perebutan kekuasaan oleh militer. Hingga dasawarsa 1980 an di Amerika Latin terjadi 81 kasus perebutan kekuasaan oleh militer (53 sukses, 28 gagal), di Asia 42 kasus (21 sukses, 21 gagal), di Afrika terjadi 78 kasus (32 sukses, 46 gagal) dan di Timur Tengah terjadi 83 kasus kudeta militer (41 sukses, 42 gagal). (Clark, 1986 : 152).

2.2. *Tingkat perkembangan masyarakat dan intervensi militer*

Sebagaimana telah disinggung dalam sub bab 2.1, bahwa militer lebih banyak campur tangan pada masyarakat yang masih terbelakang, maka disini ada keterkaitan antara tingkat pertumbuhan masyarakat dengan intensitas keterlibatan militer dalam politik. Samuel Finner menyebutkan ada 3 level masyarakat yang berkaitan dengan intensitas keterlibatan militer, yaitu : masyarakat dengan budaya politik maju (*developed political culture*), budaya politik rendah (*low political culture*) dan budaya politik minimal (*minimal political culture*). Sedangkan keterlibatan militer dalam politik juga dibedakan menjadi empat level, yaitu : *pertama*, militer mempengaruhi para penguasa sipil untuk berpihak pada kepentingan mereka. Di level ini, keterlibatan militer masih konstitusional dan legitimate, sebagaimana kelompok-kelompok lobby atau elemen-elemen birokrasi juga bekerja dengan cara demikian. *Kedua*, militer melakukan tekanan atau pemerasan terhadap penguasa sipil. Bentuk tekanan ini bisa bervariasi mulai dari intimidasi hingga ancaman dan sanksi-sanksi bila ancaman tidak dipenuhi. *Ketiga*, mengganti pejabat pemerintah (*displacement*) dengan pejabat lain yang lebih menguntungkan pihak pemerintah. Cara menggantinya baik dengan ancaman maupun dengan cara

kekerasan. Keempat, mengambil alih pemerintahan sipil dengan pemerintahan militer (*supplantment*). (Finer, 2002 : 86-88)

Masyarakat budaya politik maju (*developed political culture*) baik yang sifatnya *mature political culture* dan *highly developed political culture* memiliki ciri-ciri antara lain : terdapat formula politik yang bisa diterima bahwa para pemimpin mengklaim hak moral untuk memerintah dan dipatuhi, prosedur dan organ-organ sipil yang kompleks bersama-sama bekerja dan diakui otoritasnya, dan ada keterlibatan organisasi-organisasi sipil yang kuat dan menyebar. Negara-negara Eropa Barat dan Amerika Utara, termasuk Uni Soviet, dimana partai komunis mengontrol secara penuh kekuatan militer, bisa dikategorikan dalam kelompok ini. Pada masyarakat seperti ini keterlibatan militer secara umum pada level pertama dan kedua (*influence dan pressure/blackmail*). (Finer, 2002 : 88).

Teori yang hampir sama dikemukakan Harries Jenkins Gwyn tentang militer di negara-negara kesejahteraan (*welfare states*). Di negara-negara ini tujuan untuk kesejahteraan rakyat secara umum, sehingga militer hanya dianggap absah sejauh eksistensi dan pemakaian kekuasaannya telah disetujui masyarakat secara keseluruhan. Di negara-negara Skandinavia dan Belanda misalnya, tujuan-tujuan militer harus serasi dengan tujuan masyarakat secara umum, yaitu untuk peningkatan kesejahteraan, dan secara spesifik tujuan umum negara kesejahteraan adalah membantu individu-individu untuk merealisasi tujuan-tujuan pribadi, kehormatan dan harga diri mereka. (Gwyn, 1985 : 225)

Eksistensi dan peran militer di negara-negara kesejahteraan juga tergantung para preferensi pemerintah sipil untuk menentukan prioritas tujuan-tujuan jangka pendek, dan ini menyangkut presentase anggaran pertahanan dibandingkan dengan anggaran pada sektor-sektor lain. Masyarakat umum secara terbuka akan bisa menilai apakah pemerintah yang bersangkutan lebih concern tentang pendidikan, lingkungan, kesehatan atau peningkatan kekuatan militer dengan melihat presentase anggaran belanja militernya. Persoalan penilaian publik adalah masalah yang berhubungan dengan elektorat (pilihan pada saat pemilu). Hal inilah yang membuat pejabat pemerintah sipil untuk berhati-hati dalam hal hubungannya dengan pihak militer. (Gwyn, 1985 : 243).

Masyarakat dengan budaya politik rendah (*low political culture*) yaitu masyarakat dengan karakteristik antara lain organisasi-organisasi publik sedikit dan pengaruhnya lemah, dan terjadi pertikaian diantara para penguasa dan prosedur yang bertentangan. Pada masyarakat seperti ini tidak ada opini yang cukup kuat untuk menentang intervensi militer dalam politik, karena dalam masyarakat sendiri juga saling bertikai. Negara-

negara seperti Argentina, Turkey, Spanyol, Syiria, Mesir dan Korea Selatan (1980an) bisa dikategorikan dalam kelompok masyarakat ini. Pada tipe masyarakat seperti ini keterlibatan militer bisa berada pada tahap displacement atau bahkan supplantment. Revolusi militer di Mesir (1952), Iraq dan Pakistan (1958) menggantikan pemerintahan sipil dimana parlemen negara-negara tersebut dikuasai oleh oligarkhi yang mengisolasi diri dari rakyat, tidak efisien, korup, ambisius, pengkhianat dan pro-kolonial. Di negara-negara tersebut, memungkinkan militer menggantikan pemerintahan sipil yang lemah dengan pemerintahan lain dengan cara-cara kekerasan atau ancaman. (Finer, 2002 : 117)

Masyarakat dengan budaya politik minimal (*minimal political culture*) yaitu masyarakat dimana pemerintahnya mengabaikan opini publik dan artikulasi ide-ide dan gagasan politik terorganisir dengan sangat lemah. Masyarakat pada level ini persoalan legitimasi dan konsensus tidak relevan, masyarakatnya plural dengan identitas berdasar provinsi, lokalisme, kedaerahan dan kasta masih kuat. Negara-negara Asia Tenggara dan Asia Selatan masuk dalam kategori ini. Pada level masyarakat ini, keterlibatan militer berada pada mode displacement dan juga supplantment. Militer mengambil alih kekuasaan secara penuh dan tidak memerlukan persetujuan pihak sipil dan lembaga-lembaga lain untuk mempertahankan kekuasaan mereka. (Finer, 2002 : 130, Gegory dan Ellinwood, 1985 : 42-44)

2.3. Faktor-faktor internal dan eksternal keterlibatan militer dalam politik

Selain dikaitkan dengan tingkat perkembangan masyarakat, beberapa faktor internal dan eksternal diidentifikasi memiliki pengaruh intervensi militer dalam politik. Robert P. Clark menyebutkan paling tidak ada sebelas faktor, yaitu : (Clark, 1986 : 155-156, lihat juga Paul Brooker, 2000 : 72))

- i. Jatuhnya prestige pemerintah atau partai politik yang memegang pemerintahan menyebabkan rezim yang bersangkutan semakin banyak menggunakan cara-cara paksaan untuk memelihara ketertiban dan menekankan perlunya persatuan nasional dalam menghadapi krisis, yang selanjutnya menyebabkan penindasan terhadap perbedaan pendapat.
- ii. Perpecahan antara atau diantara pemimpin-pemimpin politik sehingga menimbulkan keraguan-raguan pada pimpinan militer apakah rezim sipil masih mampu untuk memerintah secara efektif
- iii. Kecilnya kemungkinan terjadinya intervensi oleh negara luar atau negara tetangga dalam hal perebutan kekuasaan
- iv. Akibat pengaruh dari perebutan kekuasaan oleh militer yang terjadi di negara-negara tetangga.

- v. Permusuhan sosial dalam negeri, seperti yang terjadi di negara-negara yang diperintah oleh kelompok minoritas (seperti suku Ibo di Nigeria, suku Arab di Zanzibar)
- vi. Krisis ekonomi, yang menyebabkan dicabutnya kebijakan penghematan yang mempengaruhi sektor-sektor masyarakat kota yang terorganisir.
- vii. Korupsi dan pejabat-pejabat pemerintahan dan partai yang tidak efisien, atau anggapan bahwa pejabat-pejabat sipil berniat menjual bangsanya pada suatu kelompok asing (seperti Peru pada masa pemerintahan Fernando Belaunde ; Chili pada masa pemerintahan Salvador Allende).
- viii. Struktur kelas yang sangat ketat, yang menyebabkan menjadi anggota militer adalah satu-satunya saluran yang terbuka untuk anak-anak dari masyarakat miskin untuk naik ke status yang lebih tinggi.
- ix. Kepercayaan yang semakin tebal kepada anggota-anggota militer bahwa merekalah satu-satunya kelas sosial yang mempunyai cukup disiplin dan kesetiaan kepada modernisasi untuk sebagai cara negara untuk meninggalkan tata cara tradisional.
- x. Pengaruh asing, dapat melibatkan perwakilan militer negara asing, pengalaman yang diperoleh dalam perang di negara asing (misalnya, batalyon Columbia dalam Perang Korea), atau dalam pusat-pusat latihan militer di luar negeri, atau bantuan asing dalam bentuk peralatan dan senjata.
- xi. Kekalahan militer dalam perang dengan negara lain, khususnya bila para pemimpin militer yakin bahwa para pejabat sipil telah mengkhianati mereka dengan merundingkan ketentuan perjanjian damai yang tidak menguntungkan atau karena salah menjalankan kegiatan perang di belakang garis pertempuran (seperti Bolivia tahun 1940-an).

2.4. Faktor-faktor ekonomi

Faktor ekonomi diduga juga mempengaruhi ketertarikan militer untuk terlibat dalam politik. Ada beberapa teori tentang faktor ekonomi (yang salah satunya juga telah disinggung oleh Robert Clark (di sub bab 2.3 point vi) yaitu militer tertarik untuk terlibat dalam politik karena krisis ekonomi. Faktor ekonomi sebagaimana dikemukakan Clark juga dielaborasi oleh Calvert dan Calvert yang menyebutkan bahwa persoalan ekonomi jarang disebut sebagai sebab utama terjadinya kudeta militer.

Sejauh ini kegagalan kebijakan ekonomi pemerintah sipil akan berdampak terhadap secara langsung maupun tidak langsung terhadap organisasi militer. Dampak langsung adalah berkurangnya anggaran belanja untuk militer, dampak tidak langsung adalah karena kegagalan ekonomi pemerintah sipil akan membuat dukungan masyarakat kepada pemerintah sipil menjadi berkurang, dan ini menggoda pihak militer untuk mengambil tindakan. Seperti yang terjadi di Equador pada tahun 2000 dimana pemerintahan Jamail Mahuad dijatuhkan oleh kudeta militer setelah kebijakan-kebijakan ekonominya gagal dan mengalami kemunduran. (Calvert dan Calvert, 2001 : 169). Mahuad Witt membuat kebijakan ekonomi yang tidak populer yang menyebabkan inflasi hampir 60%, kondisi ini membawa rakyat Equador demonstrasi besar-besaran selama seminggu dan menyulut pemberontakan militer yang dipimpin oleh Lucio Gueterrez pada tahun 2000.

Teori yang berbeda tentang faktor ekonomi yang menarik militer untuk ikut terlibat dalam proses politik adalah tentang teori tentang kompleks industri militer atau MIC (*Military Industrial Complex*). MIC secara luas diinterpretasikan sebagai kelompok besar yang terdiri dari serikat-serikat buruh dan para politisi yang akan memperoleh keuntungan dengan meningkatnya anggaran belanja militer. Korporasi-korporasi besar yang terlibat dalam industri militer di Amerika seperti Boeing, General Dynamics, Grumman, Lockheed, McDonnell-Douglas, Northrop, Rockwell, dan sebagainya merupakan kontraktor-kontraktor yang banyak mengerjakan proyek departemen pertahanan, mereka juga saling mentransfer personel dari perusahaan ke departemen pertahanan. (Russet dan Starr, 1992 : 202-203). Keuntungan dari pengadaan senjata dan semua hal yang terkait dengan operasionalisasinya merupakan concern utama karena menyangkut keberlangsungan dari kelompok besar yang tergabung dalam industri militer dan juga menyangkut prestige dari suatu kelas tertentu.

Sebagaimana Perang Dingin usai akhir 1990an, muncul debat yang cukup seru tentang kompleks industri militer di negara-negara besar, yaitu tentang apakah anggaran militer yang selama ini cukup besar untuk memproduksi senjata dalam rangka *arm-race* masih bisa dipertahankan ? Bukankah setelah usai Perang Dingin, negara-negara superpower masih berkepentingan untuk melindungi akses sumber-sumber bahan mentah di seluruh dunia, dan dengan demikian masih memerlukan kekuatan militer untuk menjaganya ? Termasuk juga bagaimana dengan penjualan senjata ke negara-negara Dunia Ketiga, seperti wilayah panas konflik di Timur Tengah merupakan pasar empuk bagi negara-negara produsen senjata untuk memasok berbagai jenis persenjataan ? Bilanegara-negara seperti Amerika, Inggris, Perancis, Jerman memutuskan untuk mengurangi anggaran belanja

militerinya, pasar senjata yang menguntungkan itu akan jatuh ke negara-negara rival seperti Rusia, China atau Korea Utara. Bila negara melakukan pemotongan anggaran belanja militer, maka kelompok besar buruh, politisi dan para personel-personel militer juga akan menderita kerugian. (Russet dan Starr, 1992 : 203)

Hal-hal seperti diatas menjadi keberatan bagi kelompok militer di negara-negara maju. Untuk mencegah kerugian seperti ini, kelompok penekan (pressures groups) akan bekerja untuk mempengaruhi kebijakan anggaran pemerintah. Dalam hal ini, keterlibatan militer cukup dilakukan melalui pressures groups atau melalui lobby-lobby di parlemen. Di negara-negara industri maju, keterlibatan militer tidak dengan kudeta (baik dalam kategori displacement atau supplantment), tetapi keterlibatan dilakukan secara langsung atau tidak langsung (direct or indirect). Secara langsung, pihak militer memberikan rekomendasi eskplisit kepada para pembuat keputusan, dan secara tidak langsung pihak militer bisa mengontrol arus informasi atau mengontrol pilihan-pilihan yang lain. (Schiff, 2009 : 23). Selain dengan cara-cara tersebut, pihak militer juga bisa dengan memperkuat pengaruh (*influence*) terhadap para politisi, seperti di Amerika, para politisi yang mendukung peningkatan kekuatan militer biasanya berasal dari Partai Republik, di Inggris adalah Partai Konservatif.

3. Kultur Militerisme

3.1. Tampilnya Militer di Panggung Politik Myanmar

Myanmar, yang sebelumnya bernama Burma adalah wilayah bekas jajahan Inggris yang memperoleh kemerdekaannya tahun 1948. Masyarakat Burma adalah multi-culture, multi-etnis, multi-agama, dimana ada sekitar 135 kelompok etnis yang bisa dikategorikan menjadi 8 etnis utama. Etnis terbesar adalah Bamar (69%), Shan (8.5%), Kayin (6.2%), dan Rakhine 4.5% . (Than, 2001: 209). Suku Bamar (artinya orang Burma) yang merupakan suku terbesar menghuni seputar lembah Irrawaddy. Berbagai etnis di Myanmar membentuk sebuah nation-state yang belum stabil, dimana setelah kemerdekaan banyak muncul berbagai pemberontakan antara pemerintah pusat dengan berbagai etnis di daerah-daerah. Kondisi ini membuat militer Burma (*Burmese Armed Forces/Tatmadaw*) mengambil alih kekuasaan pada tahun 1962 dan Burma menjadi praetorian state, yaitu negara dengan pemerintahan militer. Inilah awal militer Burma terlibat aktif dalam kehidupan politik

Kudeta tahun 1962 dipicu oleh kekacauan politik internal, ketika pemerintahan hasil Pemilu 1960, PM U Nu memutuskan menjadikan Budha sebagai agama resmi negara. Keputusan ini direspon secara keras oleh berbagai etnis dan mereka mengangkat senjata melawan pemerintah pusat. Alasan inilah yang digunakan Jenderal Ne Win untuk mengambil alih kekuasaan. Selanjutnya pihak militer memerintah melalui *Buddhist Socialist Program Party* (BSPP). BSPP menjadi partai tunggal, dan meskipun kelihatannya BSPP adalah institusi sipil, namun BSPP dikendalikan dan dikontrol oleh militer. Dan sejak itulah secara de facto Tatmadaw mendominasi kehidupan politik, ekonomi, sosial, hukum, agama dan birokrasi lebih dari 5 dekade. (Croissant dan Lorenz, 2017 : 182)

Pemerintahan militer dibawah Jenderal Ne Win dengan BSPP menerapkan ideologi sosialisme di Myanmar. Jenderal Ne Win menyatakan mundur dari keanggotaan militer tahun 1971, dan mundur dari jabatan sebagai Ketua BSPP tahun 1988, namun secara de facto semua kebijakan-kebijakan di Myanmar adalah hasil dari arahan Ne Win. Dibawah ideologi sosialis, perekonomian Myanmar berjalan lambat, karena pemerintah militer membatasi interaksi dengan pihak luar. Keterpurukan ekonomi yang terus menerus membuat rakyat turun ke jalan-jalan dan melakukan protest. Demonstrasi merebak di kota-kota besar di seluruh Myanmar mengancam kondisi perekonomian dan inflasi yang meroket. Puncaknya adalah pada 8 Agustus 1988 (atau dikenal dengan *8-8-88 Uprising*) dimana pasukan counterinsurgency *Tatmadaw* turun ke jalan berhadapan dengan para demonstran. Pasukan itu membubarkan demonstrasi dengan cara-cara kekerasan, dan diperkirakan 3000 demonstran dan orang-orang sipil terbunuh. Namun protest dan demo tidak berhenti, bahkan ketika junta militer mengumumkan akan melaksanakan pemilu dalam tiga bulan, namun gelombang unjuk rasa tidak juga surut. Hingga kemudian pada 18 September 1988, panglima militer dan menteri pertahanan, Jenderal Saw Maung membentuk *State Law and Order Restoration Council* (SLORC). Inilah institusi militer yang mengendalikan Myanmar sejak saat itu. (Croissant dan Lorenz, 2017 : 182).

Pemerintahan militer dijalankan melalui institusi SLORC sejak 1988, dan partai tunggal diganti BSPP diganti dengan *National United Party* (NUP). Namun pemerintahan militer membolehkan partai dibawah Aung San Sukyii, *National League for Democracy* (NLD) ikut pemilu pada 1990. Pemilu 1990 merupakan pemilu yang cukup demokratis yang diikuti sekitar 93, namun hanya NLD pimpinan Aung San Sukyii dan beberapa partai berbasis etnis. NLD menang pemilu dan mendapatkan 80% kursi di parlemen, namun junta militer justru menahan Aung San Sukyii (ketua NLD) dibawah tahanan rumah. Pemerintahan militer tetap bertahan

dan tidak menyerahkan kekuasaan ke NLD sebagai partai pemenang Pemilu. Tekanan internasional setelah Su Kyii mendapat hadiah Nobel membuat pemerintahan militer Jenderal Than Swee (pengganti Jenderal Saw Maung) memberi kelonggaran kepada Su Kyii, meskipun Su Kyii tetap dilarang meninggalkan Yangoon (ibukota Myanmar sebelum pindah ke Nay Pyi Taw). (Rieffel, 2010 : xvi)

Pada Pemilu 2015, kembali partai Aung San Sukyii menang secara mutlak dan menguasai parlemen. Namun karena secara hukum Su Kyii tidak bisa menjadi presiden (UU Myanmar melarang perempuan yang menikah dengan WNA untuk menjadi) presiden, maka Htin Kyaw terpilih sebagai presiden non-militer pertama setelah lebih dari 40 tahun negara tersebut dikuasai oleh junta militer. Pada Pemilu 2020, NLD hampir menguasai keseluruhan kursi di parlemen. Inilah yang dijadikan dasar pimpinan militer Jenderal Min Aung Hlaing menuduh pemerintahan NLD telah melakukan kecurangan dalam pemilu, dan terjadilah kudeta militer tanggal 1 Februari.

3.2. Tatmadaw dan Milisi-milisi Etnis

Sejak merdeka tahun 1948, militer Myanmar telah terlibat dalam operasi-operasi menumpas pemberontakan-pemberontakan yang didasarkan pada persoalan etnis maupun ideologis. Tahun 1950, militer Myanmar telah menumpas pemberontakan sisa-sisa pasukan Kuomintang di perbatasan Thailand-Myanmar. Karena sejarah keterlibatan mempertahankan kemerdekaan inilah maka postur militer Myanmar lebih didominasi oleh pasukan infanteri. Fakta yang agak berbeda dengan negara-negara lain adalah di Myanmar masih cukup banyak kelompok-kelompok sipil bersenjata dan keberadaannya diakui oleh pemerintah dan mereka berhubungan serta berkoordinasi dengan organisasi militer resmi negara *Tatmadaw* . Milisi sipil ini eksis berdasar pada etnisitas, atau disebut sebagai EAOs (Etnis Armed Organizations) dan diakui keberadaannya oleh pemerintah pusat. (Buchanan, 2016 : 2)

Di wilayah-wilayah perbatasan, masih eksis sekitar 17 para pemimpin kelompok-kelompok bersenjata yang mendukung pemerintahan junta militer. Sebaliknya, pemerintah militer pusat memelihara kewenangan mereka sebagai pimpinan etnis-etnis tertentu, dan mereka juga diijinkan untuk membentuk pasukan (milisi). Kelompok-kelompok milisi ini menikmati hubungan dekat dengan pemerintah pusat dan mereka bertahan sebagai elit lokal. Sebagian dari organisasi milisi ini menjadi organisasi semi-politik, sementara sebagian lain menjadi para pengusaha level

nasional dan juga masih mempertahankan pengaruh mereka. (Than, 2001 : 237).

Aliansi pemerintah dan milisi sipil memainkan peran penting dalam rencana besar organisasi militer Myanmar, Tatmadaw, termasuk dalam doktrin pertahanan Tatmadaw yaitu *people's war*, yang diadopsi sejak 1960an yang menjadi panduan utama dalam menghadapi gerakan pemberontak dalam negeri dan ancaman pasukan asing. Pada periode pemerintahan dibawah SLORC (1989-2011) Tatmadaw menawarkan status resmi untuk EAOs sebagai *peace groups*, mereka menerima bantuan finansial dari pemerintah dan posisi sebagai milisi pemerintah. EAOs ditekan untuk bertransformasi menjadi milisi pemerintah (*BGF/Border Guard Forces* atau *PMF/People's Militia Forces*). (Buchanan, 2016 : 2-3). Meskipun sebagian sudah bergabung menjadi milisi pemerintah, di luar itu masih cukup banyak kelompok-kelompok sipil bersenjata yang masih harus ditaklukkan oleh Tatmadaw hingga tahun – tahun berikutnya.

Kelompok milisi di Myanmar menurut Buchanan bisa dikategorikan seperti berikut : (Buchanan, 2016 : Sec.3)

- *Tatmadaw-integrated militias* :

Kelompok ini dikenal dengan namalain *BGF/ Border Guard Forces*, yang beroperasi dibawah komando tatmadaw dan terintegrasi dalamstruktur komando tatmadaw. Data sampai tahun 2016 ada 23 batalion BGF, mereka menerima seragam dan suply senjata dari Tatmadaw. BGF bertugas membantu Tatmadaw dalam memelihara keamanan sesuai dengan rencana pertahanan nasional, dimana aktifitas BGF meliputi pengumpulan data dan informasi seputar kelompok-kelompok etnis bersenjata (EAOs) di wilayah operasi mereka dan bertindaksebagai guide bagi militer lokal dalam memerangi EAOs

- *Tatmadaw non-integrated militias*

Kelompok ini berbeda sama sekali dengan BGF baik dari segi jumlah, kekuatan, struktur komando dan latar belakangnya. Kelompok kedua ini tidak terintegrasi secara penuh dalam struktur komando Tatmadaw. Namun meskipun berbeda, kelompok ini juga berada dibawah komando Tatmadaw namun tidak terlalu terintegrasi seperti BGF, merekajuga tidak perlu melalui program training oleh Tatmadaw dan tidak berkewajiban beroperasi full-time. Dan terakhir, mereka tidak menerima gaji dari Tatmadaw. Tugas mereka pada dasarnya adalah melindungi masyarakat komunitas mereka sendiri dari ancaman EAO's

- *Tatmadaw-supported community militias*

Kelompok ketiga ini terdiri dari penduduk sipil yang direkrut dari masyarakat, dilatih dan dipersenjatai oleh Tatmadaw. Anggota-anggota Tatmadaw lokal membimbing dan mengkoordinasi kegiatan mereka.

Kelompok ini berbeda dengan tipe I dan II, personel-personel *Tatmadaw-supported community militias* seringkali dipilih oleh kepala daerah setempat, karena mereka nantinya akan bertugas di wilayah mereka dan jumlahnya juga tidak terlalu banyak. Mereka akan bertugas di suatu tempat dalam suatu kasus ketika petugas resmi *Tatmadaw* tidak hadir.

- *Ethnic armed organization militias (EAO's)*

Milisi EAO's merupakan pilar dukungan utama untuk organisasi-organisasi etnis bersenjata. Aktifitas mereka adalah melindungi komunitas mereka dari *Tatmadaw*, dari gangguan EAO's lain dan mereka juga dengan mudah dimobilisasi untuk tujuan-tujuan operasional militeris. Keanggotaan organisasi ini terdiri dari para penduduk sipil, veteran dan pensiunan tentara. Sejumlah EAO's telah eksis dan beroperasi selama 65 tahunterakhir yang membuat persoalan masalah milisi menjadi lebih rumit. Ada beberapa EAO's yang masih beroperasi hingga kini, mereka juga mengembangkan pasukan sipil yang didasarkan pada kebutuhan wilayah lokal. Contoh EAO's yang cukup kuat dan besar ada di wilayah Kachin yaitu KIO/ *Kachin Independence Organization* yang merupakan sayap politik dari KIA/*Kachin Independence Army*. Sedangkan EAO's tertua adalah KNDO/ *Karen National Defense Organization* yang dibentuk tahun 1947, dimana KNDO ini bergerak untuk mendukung gerakan KNLA/ *Karen National Liberation Army* di wilayah Karen

3.3. *Dominasi Kekuatan Bersenjata Dalam Kehidupan Rakyat Myanmar*

Pada awal keterlibatan militer di Myanmar tahun 1962, kudeta militer oleh Jenderal Ne Win dilakukan dengan alasan bahwa pemerintahan sipil tidak mampu mengatasi berbagai pemberontakan etnis yang merebak pada 1960an. Ini adalah alasan nasionalistis kelompok militer yang tidak menginginkan negara terpecah belah dan menganggap pemerintahan sipil tidak mampu mengendalikan berbagai gejala kekuasaan yang muncul dalam masyarakat. Ini seperti yang dikemukakan oleh Samuel Finner tentang teori keterlibatan militer dalam politik. Organisasi yang solid dan disiplin dari *Tatmadaw* mampu mengendalikan pemebrontakan-pemberontakan oleh milisi-milisi sipil etnis (EAO's).

Pada dekade-dekade berikutnya pemerintahan militer, Jenderal Ne Win mengindoktrinasi para perwira militer yang intinya menyebutkan bahwa hanya militerlah yang mampu menyatukan bangsa Myanmar dari ancaman disintegrasi. Ne Win juga meminimalisasi perbedaan pendapat diantara para perwiranya. Brigadir Jenderal Aung Gyi dan faksinya segera dinon-aktifkan ketika mereka tidak menyetujui kebijakan sosialisme yang berusaha

menasionalisasi perusahaan-perusahaan asing dan perusahaan milik pribadi. (Min, 2008 : 29).

Kemampuan organisasi militer untuk menjadi sebuah institusi yang solid semakin menguat ketika pada tahun-tahun sesudah kudeta 1962 Myanmar beberapa kali mengalami pemberontakan etnis. Kebijakan represif, dan bukan koalisi digunakan untuk memadamkan pemberontakan suku Arakan, Mon, Shan, Kacin, Karen dan Chin. (Gregory dan Ellinwood, 1985 :57). Usaha persatuan dan keamanan negara dilakukan dengan cara-cara diktator, dan hal ini berlanjut hingga tahun 2015. Sementara organisasi-organisasi sipil seperti partai politik, sebagian besar telah dikooptasi oleh junta, kecuali NLD yang bersikeras untuk menjadi partai non-pemerintah. Namun nasib NLD juga tidak begitu bagus, bahkan ketika memenangkan pemilu tahun 1990 mereka tidak bisa memegang kekuasaan, karena junta militer tetap menolak untuk menyerahkan kekuasaan.

Pada sisi lain, kehidupan masyarakat Myanmar, secara tradisional telah berada pada lingkup kekuatan-kekuatan bersenjata. Komunitas-komunitas etnis di berbagai daerah membentuk milisi-milisi bersenjata terutama dengan alasan keamanan. Kehidupan dengan pantauan sipil-bersenjata menjadi *way of life* masyarakat Myanmar. Banyak diantara anak-anak muda menunggu pengumuman untuk rekrutmen menjadi anggota milisi BGF, dimana pengumuman seperti ini ditempel secara terbuka untuk menarik minat publik.(Buchanan, 2016 : 54) Untuk milisi kategori i dan ii mereka mendapat dukungn finansial dari Tatmadaw mulai darigaji hingga senjata. Selain itu, para anggota milisi kategori ini juga banyak memegang bisnis-bisnis seperti restaurant, hotel, angkutan umum, dan sebagainya. Sedangkan kelompok milisi pada kategori iii dan iv dimana mereka relatif terpisah dengan organisasi militer resmi Tatmadaw, mereka harus menghidupi organisasi mereka sendiri. Cara yang paling mudah untuk membiayai operasionalisasi organisasi seperti ini adalah dengan berdagang opium dan narkoba. Di Provinsi Shan dan Kachin, adalah area produsen opium milisi bersenjata sering bentrok dengan tentara pemerintah berkaitan dengan perdagangan narkoba.

Keterlibatan militer dalam berbagai sektor dengan pengakuan, semi pengakuan atau tidak diakui secara resmi adalah gambaran kehidupan sehari-hari rakyat Myanmar. Militer dan kelompok milisi mengendalikan keamanan, bisnis, transportasi dan juga mengerjakan proyek-proyek pembangunan. Bagaimana situasi ini bisa diserahkan kepada kelompok masyarakat sipil dan kembali ke barak ? Dalam kategori Samuel Finner, sampai akhir tahun 2000an, masyarakat Myanmar masih dalam posisi minimal-political culture, dimana kudeta masih menjadi pilihan untuk merebut kekuasaan. Alasan-alasan organisasi dan persoalan ekonomi

menjadi alasan yang bisa diterima untuk menjelaskan keterlibatan militer dalam berbagai aspek kehidupan rakyat Myanmar.

4. Penutup

Rakyat Myanmar kembali menghadapi situasi pemerintahan diktatorial militerisme setelah mereka sempat menikmati kehidupan demokrasi sejak tahun 2015 hingga 2020. Kudeta militer pada Februari 2021 membuat mereka berhadapan dengan “hantu” masa lalu, yaitu junta militer yang represif, yang mampu membunuh ribuan rakyat sipil pada masa demonstrasi 1988. Pada kudeta militer pertama tahun 1962, alasan persatuan dan keamanan nasional menjadi dasar militer mengambil alih kekuasaan sipil. Sedangkan pada kudeta terakhir 2021, alasan kecurangan Pemilu menjadi sebab militer mengambil alih kekuasaan. Rakyat Myanmar sudah belajar berdemokrasi selama lima tahun, namun sebelum bergerak menjadi demokrasi yang lebih jauh, Tatmadaw telah mengambil alih kekuasaan dan kembali menegakkan junta militer.

Adalah kelompok milenial yang mendorong demonstrasi besar-besaran di berbagai kota di Myanmar sebagai respon terhadap kudeta 2021. Generasi yang lebih terdidik ini tidak ingin mengalami cara-cara hidup militeristik. Kelompok milenial ini tidak hanya eksis dikota-kota besar, namun mereka juga muncul di daerah-daerah dan kota-kota yang jauh dari Nay Piy Taw. Sesuai dengan sifat dan ciri generasi milenial, mereka melek teknologi internet, lebih terdidik, kritis, menginginkan kehidupan demokrasi yang mengijinkan kebebasan dan menolak cara-cara represif dan diktatorship, dan juga menolak budaya militerisme yang bertentangan dengan cara hidup demokrasi.

DAFTAR PUSTAKA

Brooker, Paul, 2000, *Non-Democratic Regimes : Theory, Government & Politics*, London : Macmillan Press, Ltd.

Buchanan, John, 2016, *Militias in Myanmar*, The Asia Foundation

Calvert, Peter dan Susan Calvert, 2001, *Politics and Society in the Third World*, Second Edition, London : Pearson Education Limited.

Clark, Robert P., 1986, *Menguak Kekuasaan dan Politik Di Dunia Ketiga*, (Terjemahan), Jakarta : Penerbit Erlangga.

Croissant, Aurel dan Philip Lorenz, 2017, *Comparative Politics of South East Asia : An Introduction to Governments and Political Regimes*, Springer

Finer, Samuel Edward, 2002, *The Man On Horseback : The Role of The Military in Politics*, New Jersey : Transaction Publisher.

Gregory, Ann dan De Witt C. Ellinwood, “Pengendalian Etnis dan Rekrutmen Calon Prajurit Militer di Asia Selatan dan Asia Tenggara”, dalam Morris Janowitz, Ed., 1985, *Hubungan-hubungan Sipil – Militer*, (Terjemahan), Jakarta : Bina Aksara

Gwyn, Harries Jenkins, 1985, “Angkatan Bersenjata dan Negara Kesejahteraan”, dalam Morris Janowitz, Ed., 1985, *Hubungan-hubungan Sipil – Militer*, (Terjemahan), Jakarta : Bina Aksara

Hlaing, Kyaw Yin, “Problems with the Process of Reconciliation”, dalam Lex Rieffel, Editor, 2010, *Myanmar/Burma : Inside Challenges, Outside Interests*, Konrad Adenauer Foundation, Brookings Institution Press, *Washington, D.C.*

Horsey, Richard, “The Dramatic Events of 2007 in Myanmar : Domestic and International Implications”, dalam Skidmore, Monique, dan Trevor Wilson (eds), 2008, *Dictatorship, Disorder and Decline in Myanmar*, Canberra : ANU E Press

Janowitz, Morris, Ed., 1985, *Hubungan-hubungan Sipil – Militer*, (Terjemahan), Jakarta : Bina Aksara

Luttwak, Edward, 1969, *Coup D’etat : A Practical Handbook*, New York : Alfred A.Knopf, Inc.

Rieffel, Lex, Editor, 2010, *Myanmar/Burma : Inside Challenges, Outside Interests*, Konrad Adenauer Foundation, Brookings Institution Press, *Washington, D.C.*

Russet, Bruce dan Harvey Starr, 1992, *World Politics : The Menu For Choice*, New York : W.H. Freeman and Company.

Schiff, Rebecca L. 2009, *The Military and Domestic Politics : A Concordance Theory of Civil–Military Relations*, Routledge, Oxon

Than, Tin Maung Maung, 2001, “Myanmar :Military in Charge”, dalam John Funston, Ed., *Government and Politics in Southeast Asia*, Singapore : ISEAS.

Applegate RA, Major R.A.D dan R.J. Moore, *The Nature of Military Culture*,

<https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/07430179008405460?src=recsys>

<https://www.vox.com/2015/5/14/18093760/thailand-coup-problem>, 14 Mei 2015

<https://www.bbc.com/news/world-asia-55882489>, 1 Februari, 2021

<https://www.reuters.com/article/us-myanmar-politics-timeline-idUSKBN2A112I>, 1 Februari, 2021

<https://www.kompas.com/global/read/2021/02/11/085906070/joe-biden-putus-akses-keuangan-jenderal-myanmar-ke-as-sebagai-sanksi>, 11 Februari 2021

<https://www.bbc.com/indonesia/dunia-56005922>, 11 Februari 2021

<https://www.cnbcindonesia.com/news/20210218070709-4-224171/myanmar-makin-membara-warga-demo-besar-lawan-militer>, 18 Februari 2021

<https://www.voanews.com/east-asia-pacific/banks-closed-myanmar-anti-coup-protests-financial-chaos-continue>, 20 Februari 2021